COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KONFLIK HARIMAU SUMATERA DAN MANUSIA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

Amara Ibna Tasyania
NPP. 33.0282
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: amaratasyania@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Dadang Supriatna,S.Sos.,M.Si
Email: dadangsupriatna892@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Gap): *The Sumatran tiger-human conflict in West Lampung Regency has reached a critical stage, with 11 reported attacks in less than two years, posing a significant threat to human safety and public order. Despite the establishment of a dedicated Task Force, current mitigation efforts remain fragmented and improvisational, lacking a robust conceptual framework for inter-agency synergy.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in managing Sumatran tiger-human conflicts.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation. The analytical framework is based on Ansell and Gash's Collaborative Governance theory, focusing on the dimensions of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process.* ***Result:*** *The findings indicate that while collaboration has been initiated through integrated patrols and mitigation awareness programs, its effectiveness is hindered by the lack of periodic evaluation, budgetary constraints, and coordination mechanisms that remain overly procedural and unresponsive to emergency field situations.* ***Conclusion:*** *Collaborative governance implementation is not yet fully effective due to its reliance on individual agency initiatives rather than a systemic institutional approach. Strengthening this governance requires the standardization of operational procedures, synchronized budgetary commitments, and increased community engagement to ensure a systematic and sustainable conflict management system.*

Keywords: *Collaborative Governance, Human–Wildlife Conflict, Public Order and Social Stability.*

ABSTRAK

Permasalahan (Gap): Konflik antara manusia dan harimau Sumatera di Kabupaten Lampung Barat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan 11 kasus serangan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, yang mengancam keselamatan warga dan ketertiban umum. Meskipun pemerintah telah membentuk Satuan Tugas, penanganan masih bersifat parsial dan improvisatif karena belum adanya dasar konseptual yang kuat mengenai sinergi lintas instansi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pisau analisis yang digunakan adalah teori

Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup dimensi *starting conditions, institutional design, facilitative leadership,* dan *collaborative process*. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah diinisiasi melalui patroli terpadu dan sosialisasi mitigasi. Namun, efektivitasnya terhambat oleh minimnya evaluasi berkala, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang masih bersifat prosedural dan belum responsif terhadap situasi darurat di lapangan. **Kesimpulan:** Penerapan *collaborative governance* belum sepenuhnya efektif karena ketergantungan pada inisiatif personal antarlembaga. Diperlukan penguatan melalui standardisasi mekanisme kerja, sinkronisasi komitmen anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar penanganan konflik menjadi sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Konflik Manusia dan Satwa Liar, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara manusia dan satwa liar adalah semua bentuk perjumpaan yang menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya manusia, serta mengganggu upaya menjaga keberadaan satwa liar dan lingkungan sekitarnya (Garcia et al., 2017). Dampak konflik ini berbeda-beda tergantung jenis satwa dan tingkat toleransi masyarakat terhadap gangguan yang ditimbulkan (Shanko, Getahun Tona,2022).Fenomena *Human–Wildlife Conflict* (HWC) ini kini menjadi isu global yang tidak hanya mengancam kelestarian spesies yang dilindungi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Trantibum adalah upaya integral dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis (Ilham M.Si, Prof.Dr.M Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP, 2023) dan menurut Eviany & Sutiyo, 2023 trantibum adalah kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, tertib, dan teratur sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Tingkat konflik antara manusia dan satwa liar secara global menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Sharma et al., 2021).*Human–Wildlife Conflict* (HWC) kini menjadi fenomena global yang kompleks karena sering memicu ketegangan sosial dan ketimpangan lingkungan dalam pengelolaan kawasan lindung (Alba-Patiño et al.,2025). Secara teori, keputusan yang diambil dalam pengelolaan satwa liar bertujuan untuk mencapai satu atau lebih sasaran tertentu, seperti melindungi spesies yang terancam, mendorong pemanfaatan populasi yang dipanen secara berkelanjutan, atau mengurangi interaksi negatif antara satwa liar dan manusia (Cusack et al., 2022).

Di Indonesia, Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap konflik tersebut, mengingat status harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sebagai spesies yang kritis dan terancam punah. Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, menjadi lokus krusial karena berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Konflik manusia-harimau lebih sering terjadi pada kawasan dengan tingkat gangguan sedang, seperti hutan pemanfaatan ganda (*multiple-use forests*), tempat manusia dan harimau hidup berdampingan (Nyhus & Tilson, 2004).Data empiris menunjukkan bahwa fragmentasi habitat akibat perambahan lahan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, serta pertumbuhan aktivitas masyarakat di zona penyangga telah memicu perjumpaan berbahaya antara harimau dan manusia. Krisis ini memuncak dengan tercatatnya 11 kasus serangan harimau terhadap warga dalam kurun waktu Februari 2024 hingga September 2025, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan menyebabkan trauma kolektif serta keresahan sosial yang mendalam di masyarakat. Dampak konflik ini tidak hanya bersifat ekologis, melainkan juga melumpuhkan

produktivitas ekonomi lokal dan menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Pengelolaan konflik yang efektif memerlukan pengakuan dari seluruh pihak bahwa konflik merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara kolektif (Redpath et al., 2013).Penanganan konflik manusia–harimau tidak hanya memerlukan tindakan teknis di lapangan, tetapi juga koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui sistem tata kelola yang adaptif agar pengelolaan konflik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (figel et al., 2016).

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi keselamatan warga tanpa mengabaikan kelestarian satwa. pemerintahan menunjukkan kegiatan menggunakan kekuasaan dalam berbagai bidang publik dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan ranah publik, seperti kepentingan warga negara, pemilih, dan pekerja (Labolo Muhadam, 2014). Secara umum, pemerintah merupakan lembaga yang berwenang membuat serta menegakkan aturan dan hukum dalam suatu wilayah tertentu (Ismail, 2017). Namun, selama ini penanganan konflik yang dilakukan cenderung bersifat insidental, sektoral, dan improvisatif. Praktik penanganan yang belum terintegrasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola kolaboratif, di mana pembagian peran antara pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), lembaga konservasi (TNBBS/BKSDA), serta masyarakat belum berjalan secara sinkron,Upaya mitigasi konflik memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui sistem penjagaan bersama, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan konflik satwa liar (Gatew & Azadge, 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, urgensi penanganan konflik ini menuntut pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur melalui *Collaborative Governance*. Pengelolaan konflik manusia dan satwa liar membutuhkan kerja sama lintas sektor serta proses komunikasi yang interaktif antara aktor untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Young et al., 2014).Pendekatan ini relevan untuk menata ulang sinergi antaraktor dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kebijakan di lapangan. Melalui tata kelola kolaboratif, penanganan konflik tidak lagi bertumpu pada satu instansi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang berbasis pada konsensus, pembagian peran yang jelas, dan komunikasi lintas sektoral. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya merespons melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat No. 352 Tahun 2022, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi yang bersifat prosedural dan belum responsif terhadap situasi darurat. Kesenjangan antara regulasi dan realitas operasional inilah yang menjadi *factual problem* dalam penelitian ini. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian mendalam mengenai bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dapat memperkuat sinergi antaraktor untuk menciptakan tata kelola konflik yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi *research gap* terkait kajian kolaborasi lintas sektor dalam konteks penanganan konflik satwa liar di tingkat daerah, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah rawan konflik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan mendasar antara tuntutan kebijakan penanganan konflik manusia dengan satwa liar yang responsif dengan realitas tata kelola kolaboratif yang masih bersifat improvisatif di tingkat daerah. Penulis mengidentifikasi beberapa kesenjangan utama yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini: Pertama, adanya kesenjangan antara pendekatan sektoral dan kebutuhan tata kelola lintas sektor. studi terdahulu mengenai konflik

harimau Sumatera masih didominasi oleh perspektif ekologis dan biologis yang menitikberatkan pada pola perilaku satwa serta degradasi habitat. Di sisi lain, kajian kebijakan publik yang ada cenderung bersifat administratif dan belum banyak menyentuh dinamika interaksi aktor dalam kerangka *Collaborative Governance* yang spesifik pada konteks darurat ketertiban umum. Akibatnya, terjadi diskoneksi antara upaya konservasi yang dilakukan oleh lembaga teknis dengan kewenangan penegakan ketertiban umum yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terdapat kesenjangan operasional dalam implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun regulasi formal berupa Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Satgas Penanggulangan Konflik telah diterbitkan, dalam praktiknya masih terjadi fenomena *collaboration fatigue* atau kelelahan kolaborasi. Para aktor seringkali bekerja berdasarkan rutinitas tanpa adanya mekanisme evaluasi bersama yang sistematis. Penulis menemukan bahwa koordinasi antar-instansi masih sangat bergantung pada inisiatif personal aktor di lapangan, bukan pada sistem kelembagaan yang kokoh. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam respons cepat (*rapid response*) ketika masyarakat terdampak serangan harimau, yang seharusnya menjadi prioritas utama. adanya kesenjangan partisipasi publik (pelibatan masyarakat sebagai subjek). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat cenderung diposisikan hanya sebagai objek kebijakan atau sekadar informan saat konflik terjadi. Belum ada model kolaborasi yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan mitigasi, yang secara sosiologis sebenarnya merupakan aktor yang paling terdampak oleh risiko konflik. Kurangnya pelibatan bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat lokal ini menyebabkan kebijakan mitigasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

kesenjangan geografis dan konteks spesifik. Belum terdapat penelitian yang membedah efektivitas *Collaborative Governance* pada wilayah dengan karakteristik geografis pegunungan dan tipologi konflik yang ekstrem seperti di Kabupaten Lampung Barat. Dinamika sosial di wilayah yang berbatasan langsung dengan TNBBS memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash dapat dioperasionalkan di Kabupaten Lampung Barat, guna mengubah pendekatan yang semula bersifat teknis-sektoral menjadi tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memegang peranan strategis dan memiliki urgensi yang mendesak, penelitian ini sangat penting untuk menguji relevansi teori *Collaborative Governance* pada ranah manajemen konflik satwa liar yang bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Fenomena konflik manusia dan harimau Sumatera merupakan masalah publik yang kompleks, ambigu, dan sulit diatasi dengan pendekatan administratif hierarkis konvensional. Penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana aktor-aktor dengan kepentingan yang kontradiktif (antara perlindungan kawasan konservasi dan kebutuhan ruang hidup masyarakat) dapat disatukan dalam forum deliberatif yang formal. Hal ini akan memberikan sumbangsih teoretis bagi pengembangan kajian pemerintahan daerah dalam menghadapi dinamika sosial-ekologis yang dinamis. penelitian ini sangat krusial dilakukan saat ini mengingat eskalasi konflik di Kabupaten Lampung Barat telah mencapai titik yang membahayakan keselamatan jiwa masyarakat dan kelestarian spesies langka. Konflik ini telah bermutasi dari sekadar isu lingkungan menjadi krisis ketenteraman dan ketertiban umum (*Trantibum*). Tanpa adanya kajian komprehensif mengenai bagaimana kolaborasi antaraktor dijalankan, penanganan konflik akan terus terjebak dalam pola-pola reaktif yang

bersifat *ad-hoc* (mitigasi sesaat) tanpa menyentuh akar permasalahan koordinasi. Urgensi ini terletak pada upaya menggeser paradigma penanganan konflik dari pola improvisatif menuju pola tata kelola kolaboratif yang terukur, sistematis, dan terintegrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Balai Besar TNBBS, TNI/Polri, serta *Wildlife Conservation Society* (WCS). Hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai instrumen evaluasi kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk mereformasi prosedur kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik. Dengan mengidentifikasi secara detail hambatan dalam dimensi *Collaborative Governance* seperti koordinasi yang masih prosedural dan belum responsive, penelitian ini memberikan peta jalan (*road map*) bagi pemerintah daerah untuk menyusun standar operasional prosedur yang lebih responsif dan sinkronisasi komitmen anggaran lintas instansi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat mendesak demi menciptakan tata kelola kolaboratif yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, guna memastikan bahwa penanganan konflik di Kabupaten Lampung Barat mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tahap awal yang sangat penting dan mendasar sebelum suatu penelitian dilaksanakan. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan menjadi landasan konseptual sekaligus rujukan utama dalam membangun arah dan fokus penelitian ini. Dalam konteks *Collaborative Governance* dalam penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di Kabupaten Lampung Barat. Provinsi Lampung, telah terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan acuan penting untuk memperkuat analisis serta memperjelas posisi kebaruan penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shetie Gatew dan Worku Azadge (2025) menganalisis konflik manusia dengan satwa liar di Ethiopia menggunakan pendekatan *mixed methods*. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan faktor utama yang menghambat mitigasi konflik. Penelitian ini memberikan perspektif penting mengenai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, yang relevan dengan kondisi keresahan masyarakat di Lampung Barat. Penelitian dari Henzulkifli Rahman dkk. (2022) juga mengkaji pola konflik manusia dengan harimau di Sumatera Barat melalui pendekatan spasial. Fokus mereka pada degradasi landskap hutan memberikan dasar pemahaman mengenai akar permasalahan lingkungan (penyempitan habitat) yang menjadi pemicu konflik utama. Studi ini memperkuat argumen bahwa fragmentasi habitat memerlukan intervensi kolaboratif lintas sektor. Penelitian oleh Gettar Crista Prahara & Maya Puspita Dewi (2022) meneliti penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ekowisata. Temuan mereka menekankan bahwa kegagalan tata kelola kawasan konservasi sering terjadi akibat minimnya pemetaan peran antaraktor. Konsep pemetaan peran ini menjadi referensi teoretis yang sangat relevan untuk diadaptasi dalam menganalisis sinergi Satgas penanganan konflik di Lampung Barat. Selanjutnya penelitian oleh Zaqi Maula Zamzami dkk.(2021) ,mengevaluasi efektivitas patroli terpadu dalam Perlindungan satwa liar di Taman Nasional Way Kambas. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa kendala personel dan keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan teknis yang krusial dalam kolaborasi lapangan. Temuan ini selaras dengan kondisi di Lampung Barat, di mana aspek teknis operasional seringkali menjadi penghambat efektivitas kolaborasi. Serta penelitian oleh Vika Widya Wati (2021) memodelkan potensi konflik manusia–harimau berdasarkan data historis. Meskipun penelitian ini bersifat spasial-biologis, kontribusinya terletak pada pemahaman mengenai faktor kedekatan kawasan konservasi dengan permukiman sebagai pemicu dominan yang menuntut adanya pendekatan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan adanya *research gap* yang signifikan. Sebagian

besar penelitian terdahulu masih terjebak pada dikotomi antara kajian teknis ekologis (perlindungan satwa) atau kajian manajemen hutan. Masih sangat sedikit literatur yang secara mendalam membedah mekanisme tata kelola kolaboratif *(Collaborative Governance*) dari perspektif ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama penegak peraturan daerah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada aspek kolaborasi antaraktor yakni Pemda, Satpol PP, Aparat Keamanan, Lembaga Konservasi, dan Masyarakat dalam menangani konflik manusia-harimau. Kebaruan *(novelty)* dari penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan teori Collaborative Governance dengan peran Satpol PP sebagai institusi yang menjamin stabilitas sosial di wilayah rawan konflik satwa liar, sebuah pendekatan yang belum terekspos secara komprehensif pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah (*Novelty*)

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) yang membedakannya dari berbagai studi sebelumnya terkait konflik manusia dan satwa liar. Kebaruan ini diwujudkan melalui pengintegrasian perspektif kebijakan, teori, dan konteks lokus. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai konflik manusia dan satwa liar umumnya berorientasi pada aspek ekologis, spasial, atau biologi konservasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma dari manajemen konservasi murni menuju manajemen ketenteraman dan ketertiban umum .Peneliti mengkaji isu ini melalui kacamata administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, di mana penanganan harimau Sumatera tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab instansi teknis (TNBBS/BKSDA) semata, melainkan sebagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan kewenangan penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori *Collaborative Governance* dengan mengaplikasikan model Penta Helix secara lebih spesifik dalam konteks konflik satwa liar yang ekstrem. Jika studi sebelumnya cenderung menggunakan *Collaborative Governance* dalam konteks pelayanan publik atau ekowisata, penelitian ini menguji ketahanan model tersebut dalam situasi krisis (darurat keamanan warga). Peneliti tidak hanya mengukur efektivitas kolaborasi melalui dimensi Ansell dan Gash, tetapi juga membedah bagaimana kepemimpinan fasilitatif bekerja di bawah tekanan situasi darurat (*emergency governance*) yang melibatkan ancaman keselamatan jiwa.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Barat dengan mempertimbangkan lokus yang unik, yaitu wilayah yang menerapkan Konsep Kabupaten Konservasi namun dihadapkan pada tingkat konflik manusia-harimau yang sangat tinggi. Karakteristik ini menciptakan dinamika kolaborasi yang spesifik dan berbeda dengan daerah lain. Penelitian ini menjadi yang pertama dalam membedah sinergi antaraktor di daerah yang memiliki dualisme tantangan: wajib menjaga kelestarian satwa langka di TNBBS sekaligus menjamin stabilitas keamanan permukiman yang berada di zona penyangga hutan tersebut. Berbeda dengan banyak penelitian konflik satwa liar yang cenderung menggunakan metode kuantitatif berbasis spasial atau survei statistik murni, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendalam dengan teknik triangulasi yang komprehensif. Peneliti melakukan observasi langsung pada kegiatan patroli lapangan serta menggabungkan data dari aktor lintas sektoral (pemerintah, militer, kepolisian, *NGO*, dan masyarakat terdampak). Hal ini memberikan kekayaan data yang lebih kontekstual dan mampu menangkap nuansa sosial, persepsi psikologis masyarakat, serta hambatan operasional yang seringkali terlewatkan dalam penelitian berbasis data kuantitatif.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam

penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena *Collaborative Governance* yang terjadi secara alami di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori collaborative governance, Menurut Ansell dan Gash (2008) *Collaborative Governance* merupakan suatu bentuk tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik berinteraksi secara langsung dengan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, mengutamakan konsensus dan musyawarah, serta diarahkan pada pelaksanaan kebijakan publik atau pengelolaan program publik. *Collaborative governance* merupakan suatu sistem tata kelola yang melibatkan berbagai aktor lintas batas organisasi dan sektor dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai tujuan bersama (Emerson & Nabatchi, 2015). Tujuannya adalah merumuskan ataupun melaksanakan kebijakan publik, termasuk pengelolaan program dan aset yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kolaborasi terjadi antara individu, organisasi, atau lembaga untuk mencapai tujuan, baik yang mungkin dicapai maupun yang sulit dicapai (Aldi, F. T., & Suwitri, 2021). Pemilihan pendekatan kualitatif menurut Lexy J Moleong (2018), Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang erat kaitannya dengan kegiatan observasi, dan keberhasilan keseluruhan proses. Penelitian sangat dipengaruhi oleh peran penelitinya didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna di balik interaksi sosial antaraktor dalam penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di Kabupaten Lampung Barat, di mana fenomena tersebut bersifat dinamis, kompleks, dan memerlukan eksplorasi konteks yang mendalam. Metode deskriptif dipilih agar peneliti dapat memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian, sehingga mekanisme koordinasi, komunikasi, serta hambatan yang dihadapi dapat dijelaskan secara mendetail. Untuk memperoleh data yang kredibel, Menurut Simangunsong (2017), sumber data merupakan subjek atau pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yakni memilih narasumber yang memiliki keterlibatan langsung, posisi strategis, dan otoritas dalam penanganan konflik. Informan kunci dalam penelitian ini mencakup Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Satgas, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator lapangan, serta Kepala Bidang Pengelolaan TNBBS Wilayah II Liwa sebagai otoritas teknis konservasi. Selain itu, informan pendukung seperti unsur TNI, Polri, pihak *Wildlife Conservation Society* (WCS), dan masyarakat di wilayah rawan konflik dilibatkan untuk memberikan perspektif triangulatif dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terintegrasi melalui wawancara semi-terstruktur yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam. observasi partisipatif di mana peneliti mengamati langsung aktivitas patroli gabungan dan rapat koordinasi; serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan instansi terkait. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat terdampak, serta melalui *member check* untuk memastikan keselarasan interpretasi data. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan sistematis: reduksi data untuk memusatkan perhatian pada aspek yang relevan, penyajian data (*data display*) melalui narasi deskriptif dan bagan, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan yang logis. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi fokus konflik, yakni Kabupaten Lampung Barat, Provinsi

Lampung. Proses penelitian, mulai dari observasi awal, pengumpulan data lapangan, hingga penyusunan laporan, dilakukan dalam rentang waktu empat bulan (Januari 2026 hingga April 2026). Durasi ini ditetapkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah mencapai titik jenuh, sehingga mampu menggambarkan dinamika kolaborasi secara akurat dan komprehensif. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat, 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
0-4	13.719,0	13.393,0	27.112,0
5-9	13.351,0	12.940,0	26.291,0
10-14	13.480,0	12.920,0	26.400,0
15-19	12.652,0	11.938,0	24.590,0
20-24	12.341,0	11.592,0	23.933,0
25-29	12.255,0	11.885,0	24.140,0
30-34	13.355,0	12.478,0	25.833,0
35-39	12.528,0	11.391,0	23.919,0
40-44	11.589,0	10.758,0	22.347,0
45-49	10.530,0	9.548,0	20.078,0
50-54	9.181,0	8.298,0	17.479,0
55-59	7.496,0	6.328,0	13.824,0
60-64	6.005,0	4.823,0	10.828,0
65-69	4.097,0	3.318,0	7.415,0
70-74	2.706,0	2.277,0	4.983,0
75+	2.111,0	2.114,0	4.225,0
Total	**157.396,0**	**146.001,0**	**303.397,0**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat tahun 2022, jumlah penduduk wilayah ini tercatat sebanyak 303,4 ribu jiwa, terdiri atas 157,4 ribu laki-laki dan 146 ribu perempuan. Struktur demografi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15–64 Tahun) merupakan kelompok terbesar, yang menandakan potensi tenaga kerja dan produktivitas ekonomi di daerah ini cukup tinggi. Sementara itu, anak-anak berusia 0–4 tahun berjumlah sekitar 27,1 ribu jiwa, menggambarkan tingkat kelahiran yang masih tinggi, dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai sekitar 16,6 ribu jiwa, yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.
Gambaran Umum Instansi dan Pihak Terkait dalam Kolaborasi Penanganan Konflik

Nama Instansi	PihakPeran Utama dalam Kolaborasi	Fokus Strategis
Pemerintah Kab. Lampung Barat	Koordinator utama dan fasilitator Satgas.	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat
Satpol PP Kab. Lampung Barat	Penegakan ketertiban umum, patroli, dan perlindungan masyarakat.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Lampung Barat.
Polres Lampung Barat	Pengamanan wilayah dan penegakan hukum.	Menciptakan Kamtibmas yang kondusif melalui fungsi *Tekab 308 Presisi* dan *Bhabinkamtibmas*.
Kodim 0422/Lampung Barat .	Pembinaan teritorial dan dukungan operasional keamanan wilayah.	Menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah serta mendukung pembangunan nasional
Balai Besar TNBBS	Pihak teknis penanganan satwa liar dan konservasi habitat.	Melestarikan habitat satwa prioritas (Harimau, Gajah, Badak Sumatera).
WCS (NGO)	Pendampingan, survei lapangan, dan dukungan inovasi konservasi.	Pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
Masyarakat	Pihak terdampak, pelapor kejadian, dan pelaku mitigasi mandiri.	Menjaga keselamatan diri dan berpartisipasi dalam pemantauan lingkungan sekitar.

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di Kabupaten Lampung Barat melibatkan keterlibatan multisektoral yang luas, di mana setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi namun memiliki urgensi kepentingan yang berbeda. Pemerintah daerah bertindak sebagai *hub* atau pusat koordinasi, sementara instansi teknis dan aparat keamanan menjalankan fungsi operasional yang bersifat suportif dan mitigatif. Keberagaman profil instansi ini mencerminkan kompleksitas tata kelola konflik yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sinergi yang tergambar dalam tabel tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban negara untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat (*public safety*) dan tanggung jawab untuk melestarikan satwa dilindungi sebagai kekayaan hayati daerah (*environmental sustainability*). Namun demikian, keterlibatan aktor yang luas ini menuntut mekanisme koordinasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan tindakan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas kolaborasi antar instansi

tersebut tidak hanya bergantung pada formalitas struktur yang telah terbentuk, melainkan pada sejauh mana komitmen komunikasi dan responsivitas setiap aktor dalam menjalankan fungsi strategisnya masing-masing demi meminimalisir interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

3.1 Dimensi Starting Conditions

Starting conditions merupakan titik tolak fundamental dalam penerapan *collaborative governance*. Dimensi ini mengevaluasi kondisi awal hubungan antaraktor sebelum kolaborasi secara sistematis. Pemahaman mengenai kondisi awal sangat krusial karena akan menentukan tingkat kepercayaan, komitmen, serta pola interaksi yang akan terbentuk dalam proses kolaborasi selanjutnya. Berikut adalah analisis dimensi *starting conditions* dalam penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di Kabupaten Lampung Barat:

TABEL 3.
Analisis Dimensi Starting Conditions dalam Penanganan Konflik

Indikator	Kondisi lapangan	Analisis
Kepercayaan Antaraktor	Terbentuk namun masih fluktuatif (rapuh).	Instansi memiliki modal kepercayaan internal, namun masyarakat sempat mengalami trauma dan ketidakpercayaan di awal konflik.
Pengalaman Kerja Sama	Berbasis rutinitas (insidental).	Kerja sama antar instansi sudah sering dilakukan, namun lebih banyak merespons kejadian daripada perencanaan pencegahan sistematis
Keseimbangan Peran	Sudah terstruktur dalam Satgas.	Pembagian tugas secara struktural sudah jelas, namun belum didukung oleh distribusi sumber daya yang merata antar-instansi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, kondisi awal kolaborasi di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Tingkat kepercayaan antaraktor telah terbangun melalui pengalaman kerja sama sebelumnya dalam berbagai kegiatan lintas instansi. Namun, kepercayaan ini bersifat "rapuh" karena adanya kesenjangan antara persepsi pemerintah dan realitas masyarakat. Masyarakat yang menjadi korban serangan harimau sempat mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan karena respons penanganan yang dirasakan lambat. Selain itu, pengalaman kerja sama yang ada cenderung bersifat insidental dan rutinitas, yakni lebih fokus pada penanganan setelah konflik terjadi (*post-conflict*) dibandingkan penguatan sistem pencegahan sejak dini. Secara struktural, keseimbangan peran sudah terpetakan dalam struktur Satgas, namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan sumber daya, di mana instansi teknis seperti TNBBS sering kali harus menanggung beban operasional lebih besar di lapangan. Hal ini

menunjukkan bahwa *starting conditions* saat ini belum sepenuhnya menjadi modal yang cukup kuat untuk mendorong kolaborasi yang proaktif dan responsif terhadap situasi darurat.

Dengan demikian, *starting conditions* di Kabupaten Lampung Barat telah memiliki fondasi berupa pengalaman kerja sama lintas sektoral, namun belum mampu bertransformasi menjadi kepercayaan yang solid dan sistematis. Kerentanan yang muncul pada kondisi awal ini terutama pada aspek kepercayaan masyarakat dan responsivitas menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan penguatan mekanisme kerja yang lebih cepat. Tanpa adanya upaya untuk memperbaiki titik awal kolaborasi ini, maka dimensi-dimensi selanjutnya dalam *collaborative governance* akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan, mengingat keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen dasar yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat.

3.2 Dimensi Institutional Design

Institutional design dalam *collaborative governance* merujuk pada protokol dasar, aturan main, dan struktur kelembagaan yang dibentuk untuk memberikan legitimasi prosedural bagi para aktor yang terlibat. Dimensi ini krusial untuk memastikan bahwa kolaborasi tidak berjalan secara informal atau *ad-hoc*, melainkan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengatur interaksi, pembagian wewenang, serta mekanisme pengambilan keputusan di antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah. Berikut adalah analisis desain kelembagaan dalam penanganan konflik manusia dan harimau di Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 4
Analisis Dimensi *Institutional Design*

Indikator	Kondisi lapangan	Analisis
Kejelasan Struktur dan Peran	Tersedia dalam struktur Satgas.	Peran telah terbagi (Satpol PP, TNI-Polri, TNBBS, WCS), namun koordinasi operasional masih terkendala ego sektoral.
Dasar Hukum	Berbasis SK Gubernur dan SK Bupati.	Memiliki legitimasi formal, namun SOP operasional spesifik untuk mekanisme kerja Satgas masih belum lengkap.
Mekanisme Koordinasi .	Menggunakan forum rapat & grup komunikasi	Komunikasi terjalin, namun terhambat kendala teknis (jarak & sinyal) serta lambatnya respons dari beberapa instansi

Partisipasi Masyarakat	Terbatas pada pelaporan & edukasi.	Belum ada mekanisme formal yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan mitigasi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Desain kelembagaan di Kabupaten Lampung Barat secara formal telah memenuhi kriteria tata kelola kolaboratif dengan adanya pembentukan Satgas yang melibatkan aktor lintas sektor. Pembagian peran yang tertuang dalam SK Bupati memberikan kejelasan mengenai siapa melakukan apa di mana TNBBS menangani aspek teknis konservasi, sementara Satpol PP dan aparat keamanan menjaga ketertiban umum. Namun, desain ini masih menyisakan celah operasional. Ketiadaan SOP khusus yang mengatur alur koordinasi Satgas menyebabkan setiap tindakan di lapangan sering kali masih menunggu instruksi hierarkis, yang pada akhirnya memperlambat *rapid response* terhadap konflik yang bersifat darurat. Selain itu, mekanisme komunikasi yang ada, meskipun terbantu oleh media digital seperti grup WhatsApp, masih mengalami hambatan teknis yang signifikan akibat topografi wilayah yang sulit dijangkau. Tantangan mendasar lainnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif. Desain kelembagaan saat ini menempatkan masyarakat hanya sebagai pelapor, tanpa ada kanal formal bagi warga untuk memberikan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan mitigasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain institusi yang ada saat ini masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya mengintegrasikan masyarakat sebagai aktor setara dalam proses kolaboratif.

institutional design di Kabupaten Lampung Barat telah memberikan kerangka legitimasi yang kuat bagi kolaborasi antaraktor, namun masih terjebak dalam formalitas prosedural. Desain yang ada belum sepenuhnya mampu menjembatani perbedaan kecepatan respons antar instansi dan belum mengadopsi partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan mitigasi. Oleh karena itu, penguatan desain kelembagaan ke depan harus difokuskan pada penyusunan SOP yang lebih dinamis, pemanfaatan teknologi komunikasi yang adaptif terhadap kondisi geografis, serta pembentukan kanal formal partisipasi warga. Tanpa adanya pembenahan pada desain kelembagaan ini, sinergi yang terbentuk akan terus bersifat rapuh dan sulit mencapai efektivitas dalam jangka panjang

3.3 Dimensi *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen kunci dalam *collaborative governance* yang berfungsi sebagai "lem" perekat bagi para aktor yang terlibat. Dalam dimensi ini, pemimpin tidak hanya berperan sebagai komando hierarkis, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang mampu merangkul berbagai kepentingan, membangun kepercayaan, menjaga netralitas, serta mengoordinasikan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah analisis mengenai peran kepemimpinan dalam penanganan konflik harimau dan manusia di Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 5

Analisis Dimensi Facilitative Leadership

Indikator	Kondisi lapangan	Analisis

Peran Fasilitator	Sekda sebagai koordinator utama Satgas.	Pimpinan berhasil menghubungkan antar instansi dan memfasilitasi kebutuhan pendanaan.
Netralitas & Kepercayaan	Berupaya menjadi penengah antar instansi.	Pimpinan berusaha menjaga objektivitas, namun konsistensi sikap pimpinan seringkali masih diragukan oleh instansi teknis.
Penggerak Koordinasi .	menggerakkan koordinasi melalui rapat.	Pimpinan aktif dalam mengarahkan, namun masih kurang tegas dalam mempercepat respons di lapangan
Strategi Kolaboratif	Menanamkan rasa tanggung jawab bersama.	Pimpinan berhasil menumbuhkan rasa memiliki, namun belum mampu mengatasi inkonsistensi keterlibatan antar-instansi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Kepemimpinan fasilitatif dalam penanganan konflik manusia dan harimau Sumatera di Kabupaten Lampung Barat telah dijalankan dengan peran aktif Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pimpinan telah berhasil memfasilitasi kebutuhan pendanaan serta menjadi jembatan komunikasi antarinstansi. Namun, efektivitas kepemimpinan ini menghadapi tantangan pada aspek ketegasan dan konsistensi. Meskipun pimpinan telah berusaha membangun netralitas dengan memberikan ruang diskusi bagi semua pihak, ketidaksesuaian antara arahan pimpinan dengan eksekusi di lapangan oleh staf instansi teknis sering kali menurunkan tingkat kepercayaan antar lembaga. Peran pimpinan sebagai penggerak koordinasi belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala kecepatan respons di lapangan. Dalam beberapa situasi darurat, arahan yang diberikan belum cukup kuat untuk memicu percepatan tindakan, sehingga koordinasi yang terbentuk masih bersifat situasional dan kurang adaptif terhadap kebutuhan cepat penanganan konflik. Strategi pimpinan dalam membangun komitmen bersama melalui kampanye "tanggung jawab bersama" telah berhasil meningkatkan rasa peduli, namun belum mampu menyeragamkan tingkat keterlibatan setiap instansi di lapangan. Masih terlihat perbedaan tingkat keterlibatan, di mana instansi tertentu (seperti TNBBS) sering kali harus mengambil inisiatif lebih besar secara mandiri karena kurangnya dorongan komitmen yang merata dari seluruh aktor terkait.

Dengan demikian, *facilitative leadership* di Kabupaten Lampung Barat telah memainkan peran krusial dalam merintis kolaborasi lintas sektor, namun masih memerlukan penguatan dari sisi ketegasan eksekusi dan konsistensi kepemimpinan. Seorang fasilitator yang efektif dalam konteks konflik satwa liar tidak hanya dituntut untuk mampu memediasi kepentingan, tetapi juga harus memiliki otoritas yang kuat untuk memastikan bahwa komitmen bersama di meja rapat dapat diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan. Ke depan, peningkatan kualitas kepemimpinan fasilitatif harus diarahkan pada penguatan konsistensi arahan pimpinan, kemampuan mitigasi konflik kepentingan, serta ketegasan dalam memastikan bahwa setiap instansi yang tergabung dalam Satgas tetap berada pada jalur komitmen yang sama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3.4 Dimensi *Collaborative Process*

Dimensi *collaborative process* merupakan tahapan inti sekaligus motor penggerak dalam *collaborative governance*. Tahap ini menggambarkan dinamika interaksi yang terjadi di antara aktor-aktor yang terlibat, mulai dari alur komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga implementasi kegiatan nyata di lapangan. Keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari struktur yang dibentuk, melainkan dari seberapa efektif proses interaksi tersebut berjalan dalam menghasilkan solusi atas permasalahan publik yang kompleks. Berikut adalah analisis proses kolaboratif dalam penanganan konflik harimau Sumatera dan manusia di Kabupaten Lampung Barat:

Tabel 6

Analisis Dimensi *Collaborative Process*

Indikator	Kondisi lapangan	Analisis
Frekuensi dan Kualitas Komunikasi	Melalui rapat koordinasi dan media daring.	Komunikasi terjalin, namun frekuensi rapat belum rutin dan belum ada evaluasi bersama yang sistematis
Pengambilan Keputusan Bersama	Melalui musyawarah dan koordinasi lapangan.	Mekanisme partisipatif berjalan, namun sering terkendala pada tahap sinkronisasi tindakan antar instansi.
Bentuk Kegiatan Lapangan	Patroli, sosialisasi, dan penanganan konflik.	Implementasi sudah konkret, namun kegiatan masih bersifat terbatas dan insidental (kurang berkelanjutan).
Hasil Nyata Kolaborasi	Penurunan intensitas konflik dan peningkatan rasa aman.	Kolaborasi memberikan dampak positif, namun belum mampu menjadi sistem pencegahan yang permanen.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Proses kolaboratif di Kabupaten Lampung Barat telah menciptakan alur kerja yang melampaui batas-batas instansional. Mekanisme pengambilan keputusan bersama telah dilakukan melalui musyawarah lintas instansi, di mana setiap aktor diberikan ruang untuk memberikan masukan sesuai kapasitas teknisnya, seperti keterlibatan TNBBS dalam teknis konservasi dan Satpol PP dalam ketenteraman masyarakat. Namun, proses ini masih menemui hambatan dalam aspek kualitas komunikasi. Frekuensi rapat koordinasi yang belum rutin menyebabkan penyamaan persepsi antaraktor sering kali hanya terjadi di tingkat *briefing* lapangan yang bersifat situasional, bukan pada tingkat strategis yang menyeluruh. Kegiatan kolaboratif di lapangan, seperti patroli gabungan dan penggunaan *box trap* untuk evakuasi satwa, telah menunjukkan hasil nyata dalam merespons kejadian konflik. Meskipun demikian, proses ini masih cenderung reaktif terhadap laporan kejadian, bukan proaktif dalam pencegahan jangka panjang. Ketiadaan evaluasi berkala pasca-konflik menjadi titik lemah dalam siklus kolaboratif, karena setiap instansi kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelajaran kolektif guna memperbaiki pola kerja di masa depan.

Selain itu, peran aktor non-pemerintah seperti WCS dalam proses ini sering kali terbatas pada pemberian masukan teknis tanpa keterlibatan penuh dalam pengambilan keputusan utama.

Dengan demikian, *collaborative process* di Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mewujudkan sinergi dalam penanganan konflik di lapangan, namun masih memerlukan penguatan pada ritme komunikasi dan sistem evaluasi. Proses yang saat ini berjalan masih sangat bergantung pada dinamika di lapangan dan belum didukung oleh siklus evaluasi yang baku. Untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan, proses kolaboratif ke depan harus bertransformasi dari sekadar respons situasional menuju mekanisme kerja yang lebih terencana, terjadwal, dan berbasis pada refleksi atas setiap tindakan yang telah diambil. Dengan memastikan bahwa setiap aktor terlibat secara konsisten mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, proses kolaboratif ini dapat menjadi sistem yang kokoh dalam menjaga ketenteraman masyarakat sekaligus kelestarian satwa di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Keberhasilan kolaborasi di Kabupaten Lampung Barat sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian peran antaraktor yang tergabung dalam struktur Satgas penanganan konflik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prahara & Dewi (2022) yang menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi akan mengalami kegagalan apabila peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi tidak dipetakan secara jelas sejak awal. Di Lampung Barat, pembagian fungsi antara Satpol PP sebagai unsur ketertiban, TNBBS sebagai pihak teknis konservasi dan penanganan satwa, serta TNI-Polri sebagai unsur pengamanan menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Ketika pembagian peran tersebut dijalankan secara konsisten, koordinasi menjadi lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan setiap aktor dapat bekerja sesuai mandatnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak cukup hanya dibangun atas dasar kehadiran berbagai instansi, tetapi harus disertai dengan desain kelembagaan yang mampu menegaskan batas kewenangan, tanggung jawab, dan alur kerja yang jelas. Dengan demikian, temuan ini memperkuat pandangan bahwa sinergi antaraktor merupakan prasyarat penting dalam membangun tata kelola kolaboratif yang efektif.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penanganan konflik di Lampung Barat bukan semata-mata pada keterbatasan jumlah personel, melainkan pada lambatnya respons akibat mekanisme koordinasi yang masih bersifat prosedural. Hal ini sedikit berbeda dengan temuan Zaqi Maula Zamzami dkk. (2021), yang menyoroti keterbatasan personel sebagai kendala dominan dalam patroli hutan di Way Kambas. Dalam penelitian ini, persoalan yang lebih menonjol justru terletak pada kecepatan alur informasi, pengambilan keputusan, dan mobilisasi aktor ketika konflik terjadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shetie Gatew & Worku Azadge (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya alur informasi merupakan salah satu faktor utama kegagalan penanganan konflik. Di Lampung Barat, kondisi geografis yang sulit, keterbatasan jaringan komunikasi, serta jarak antarwilayah yang cukup jauh memperlambat penyampaian informasi dari lokasi kejadian ke pihak-pihak terkait. Akibatnya, respons terhadap konflik tidak selalu dapat dilakukan secara cepat dan simultan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang seharusnya bersifat tanggap darurat justru sering terjebak dalam prosedur administratif yang berbelit, sehingga mengurangi efektivitas penanganan di lapangan. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih ringkas, cepat, dan berbasis kesiapsiagaan lintas instansi.

Temuan lain yang menguat dalam penelitian ini adalah bahwa konflik manusia danharimau Sumatera sangat dipengaruhi oleh kedekatan ruang hidup masyarakat dengan kawasan konservasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Vika Widya Wati (2021) yang menyatakan bahwa faktor dominan pemicu konflik adalah kedekatan permukiman dengan

kawasan konservasi. Di Lampung Barat, aktivitas masyarakat di zona penyangga TNBBS menjadi salah satu pemicu utama munculnya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik tidak hanya muncul karena keberadaan satwa, tetapi juga karena tekanan ruang yang terus meningkat akibat aktivitas manusia di sekitar habitat satwa. Namun, temuan penelitian ini juga memiliki penekanan yang sedikit berbeda dengan penelitian Henzulkifli Rahman dkk. (2022) yang lebih menyoroti degradasi hutan secara spasial. Dalam penelitian ini, fokus analisis tidak berhenti pada perubahan tutupan lahan atau kerusakan habitat, tetapi lebih jauh pada bagaimana tata kelola kolaboratif harus merespons realitas geografis tersebut secara komprehensif. Artinya, penanganan konflik tidak dapat hanya diarahkan pada pelestarian kawasan konservasi, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak. Dengan demikian, penyelesaian konflik harus memadukan pendekatan ekologis dan pendekatan sosial secara simultan agar tidak menimbulkan beban yang lebih besar pada salah satu pihak.

Temuan yang cukup menonjol dalam penelitian ini adalah masih lemahnya budaya evaluasi bersama pascakonflik. Peneliti menemukan bahwa instansi-instansi di Lampung Barat belum secara konsisten melakukan evaluasi kolektif setelah penanganan konflik berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah dibangun belum sepenuhnya berkembang menjadi proses pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan. Temuan ini berbeda dengan asumsi yang sering muncul dalam studi kolaborasi, termasuk Prahara & Dewi (2022), yang cenderung menempatkan struktur kolaboratif sebagai faktor yang secara otomatis menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Faktanya, di Lampung Barat kolaborasi masih lebih banyak berlangsung dalam bentuk rutinitas penanganan ketika konflik terjadi, tanpa disertai mekanisme *after-action review* yang sistematis. Akibatnya, pengalaman lapangan tidak selalu diterjemahkan menjadi pembaruan prosedur, penguatan koordinasi, atau penyempurnaan strategi pencegahan. Pola seperti ini membuat penanganan konflik cenderung berulang pada masalah yang sama, sehingga pembelajaran kolektif tidak tumbuh secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya membutuhkan struktur kelembagaan, tetapi juga budaya refleksi, evaluasi, dan adaptasi yang terus-menerus.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Collaborative Governance bukanlah solusi otomatis yang dapat menyelesaikan konflik hanya dengan membentuk forum atau struktur kelembagaan. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kualitas relasi antaraktor, kecepatan komunikasi, kejelasan pembagian peran, dan keberadaan mekanisme evaluasi yang konsisten. Tanpa keempat unsur tersebut, kolaborasi berisiko berhenti pada tataran formalitas administratif dan tidak mampu menjawab kompleksitas konflik secara substantif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola konflik manusia dan harimau Sumatera di Kabupaten Lampung Barat memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, responsif, dan berbasis pembelajaran kolektif. Kolaborasi yang efektif bukan hanya soal hadirnya banyak aktor, tetapi tentang bagaimana aktor-aktor tersebut membangun kepercayaan, mengelola informasi, menegaskan peran, dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini memperkuat argumen bahwa tata kelola kolaboratif di tingkat daerah harus bergerak dari pola responsif-insidental menuju pola preventif-sistematis agar mampu menjawab tantangan konflik sosial-ekologis secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait dimensi *Collaborative Governance*, peneliti menemukan faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan kolaborasi di lapangan. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya buruknya kondisi jalan menuju lokasi rawan konflik dan minimnya jangkauan sinyal komunikasi.

Kendala geografis dan teknis ini secara nyata memperlambat kecepatan respons tim satgas ketika menerima laporan dari masyarakat, sehingga efektivitas penanganan konflik di lapangan seringkali terhambat oleh faktor yang bersifat fundamental tersebut. Di sisi lain, peneliti juga menemukan adanya faktor pendukung yang memperkuat sinergi antaraktor meskipun dalam keterbatasan. Keberadaan program-program inovatif dari pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), seperti "TNBBS Mit Sekula" dan "Minok di Lamban Warga", terbukti efektif meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada koordinasi formal antarlembaga, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menciptakan inisiatif edukasi berbasis kearifan lokal yang mampu menyentuh tingkat tapak dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, ditemukan pula adanya kesenjangan komitmen antarlembaga yang menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan kolaborasi. Meskipun terdapat semangat kerja sama yang tinggi pada saat insiden konflik terjadi, konsistensi keterlibatan instansi di luar situasi darurat masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat kecenderungan ketergantungan pada salah satu aktor teknis untuk turun ke lapangan secara mandiri, yang mengindikasikan bahwa semangat kolaboratif yang terbangun belum sepenuhnya merata dan belum terinternalisasi ke dalam pola kerja rutin seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas.

IV. KESIMPULAN

Penerapan *collaborative governance* dalam penanganan konflik manusia dan harimau Sumatera di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan namun belum optimal. Meskipun kerangka kolaborasi lintas sektor telah terbentuk melalui Satgas, implementasinya masih cenderung prosedural dan belum menyentuh aspek kolaborasi substantif. Hal ini disebabkan oleh koordinasi yang masih bersifat situasional dan ketergantungan yang tinggi pada inisiatif personal dibandingkan dengan integrasi sistematis kelembagaan. Kendala utama dalam pelaksanaan kolaborasi mencakup ketidakseimbangan respons antar-instansi terhadap situasi darurat, keterbatasan serta ketidakmerataan alokasi anggaran operasional, rendahnya intensitas komunikasi formal, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus Satgas, serta minimnya pelibatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan mitigasi. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperkuat intensitas rapat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan peran kepemimpinan melalui ketegasan dalam sinkronisasi tindakan lapangan dan pembentukan mekanisme evaluasi bersama sebagai sarana pembelajaran kolektif antar-instansi .

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek jangkauan waktu dan metodologi. Keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan pada rentang Januari hingga April 2026 menyebabkan pengamatan terhadap efektivitas kebijakan jangka panjang belum dapat terukur secara maksimal. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada satu lokus spesifik di Kabupaten Lampung Barat dengan fokus pada aktor yang terlibat dalam Satgas, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika kolaborasi di wilayah dengan karakteristik konflik satwa liar yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih pada tahap awal dalam membedah tata kelola konflik satwa liar yang efektif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lokasi serupa dengan cakupan yang lebih luas melalui studi komparatif antar-daerah guna memvalidasi model kolaborasi yang paling adaptif. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai model pembiayaan kolaboratif (*collaborative funding*) serta efektivitas penggunaan teknologi berbasis

kecerdasan buatan (*AI-based early warning system*) dalam mendukung peran aktif masyarakat di wilayah penyangga kawasan konservasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Bupati berserta seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional kabupaten Lampung Barat atas izin dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga mengapresiasi dukungan, bantuan, dan partisipasi dari seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alba-Patiño, D., Martín-López, B., Delibes-Mateos, M., Requena-Mullor, J. M., & Castro, A. J. (2025). Environmental justice gaps in human-wildlife conflict research from a social-ecological systems perspective. *Biological Conservation*, 312, 111515. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111515

Aldi, F. T., & Suwitri, S. (2021). Collaborative governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Renaissance*, 6–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24039

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Cusack, J. J., Nilsen, E. B., Israelsen, M. F., Andrén, H., Grainger, M., Linnell, J. D. C., Odden, J., & Bunnefeld, N. (2022). Quantifying the checks and balances of collaborative governance systems for adaptive carnivore management. *Journal of Applied Ecology*, 59(4), 1038–1049. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14113

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.

Figel, J. J., Safriansyah, R., Baabud, S. F., & Herman, Z. (2023). Clustered conflicts in disturbed lowlands characterize human–tiger interactions in Aceh, Indonesia. *Wildlife Letters*, 1(2), 83–91. https://doi.org/10.1002/wll2.12016

Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2017). *Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia-Harimau*. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati – Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Gatew, S., & Azadge, W. (2025). Human-wildlife conflict and its socio-economic impacts in North West Ethiopia. *Discover Life*, 55, 14. https://doi.org/10.1007/s11084-025-09685-6

Henzulkifli Rahman, Rizqi Atthoriq Hidayat, & Adek Hendra Nazar. (2022). Degradasi landskap hutan dan pola konflik harimau Sumatra di Pesisir Selatan. *El-Jughrafiyah*, 2(1), 30–38.

Ilham, M. M., Rahman, M., & Rusdianto, D. A. (2023). *Praktikum Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. IPDN Press.

Ismail, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. IPDN Press.

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-37). PT Remaja Rosdakarya.

Martomo, Y. P. (2017). *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs*. STIA-LAN Press.

Nyhus, P. J., & Tilson, R. (2004). Characterizing human-tiger conflict in Sumatra, Indonesia: Implications for conservation. *Oryx*, 38(1), 68–74. https://doi.org/10.1017/S0030605304000110

Prahara, G. C., & Dewi, M. P. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional*. 11–21. https://intropublicia.org/index.php/rp

Redpath, S. M., Young, J., Evely, A., Adams, W. M., Sutherland, W. J., Whitehouse, A., Amar, A., Lambert, R. A., Longstaff, B., Watt, A., & Gutiérrez, R. J. (2013). Understanding and managing conservation conflicts. *Trends in Ecology & Evolution*, 28(2), 100–109. https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.08.021

Shanko, G., & Tona, B. (2022). Human-terrestrial wildlife conflict in Ethiopia: A systematic review. *The Scientific World Journal*, 2022, 2612716. https://doi.org/10.1155/2022/2612716

Sharma, P., Chettri, N., & Wangchuk, K. (2021). Human–wildlife conflict in the roof of the world: Understanding multidimensional perspectives through a systematic review. *Ecology and Evolution*, 11(17), 11569–11586. https://doi.org/10.1002/ece3.7980

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Young, J. C., Waylen, K. A., Sarkki, S., Albon, S., Bainbridge, I., Balian, E., Davidson, J., Edwards, D., Fairley, R., Margerison, C., McCracken, D., Owen, R., Quine, C. P., Stewart-Roper, A., Thompson, D., Tinch, R., Van den Hove, S., & Watt, A. (2014). Improving the science-policy dialogue to meet the challenges of biodiversity conservation: Having conversations rather than talking at one another. *Biodiversity and Conservation*, 23(2), 387–404. https://doi.org/10.1007/s10531-013-0607-0

Widya Wati, V. (2021). Pemodelan Potensi Konflik Manusiadengan Harimau Sumatera *(Panthera Tigris Sumatrae)* Berdasarkan Data Historis Di Sumatera Barat. http://scholar.unand.ac.id

Zamzami, Z. M., Winarno, G. D., Fitriana, Y. R., & Banuwa, I. S. (2021). Analisis temuan patroli polisi hutan terhadap perburuan satwa liar di Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*, 4(2), 186–194. https://doi.org/10.29303/jbl.v4i2.680

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956